

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Riset

Sebagaimana diungkapkan dalam pasal keempat dari Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, salah satu tujuan negara Indonesia adalah meningkatkan kecerdasan kehidupan bangsa. Pendidikan memegang peranan penting dalam kehidupan seseorang. Ia menjadi kunci kesuksesan di masa depan dan membuka peluang yang luas dalam hidupnya. Beragam manfaat dapat diperoleh dari pendidikan, seperti mencapai karir yang gemilang, mendapatkan pengakuan di masyarakat, serta meningkatkan rasa percaya diri (Vaxevanidou, 2018). Kegiatan belajar mengajar yang terjadi di lapangan masih belum optimal dan berakibat pada ketidakefektifan.

Hingga saat ini, Indonesia terus berupaya untuk memberikan pendidikan yang lengkap dan berkualitas tinggi kepada seluruh penduduknya. Dibandingkan dengan negara-negara Asia Tenggara lainnya, tingkat melek huruf di Indonesia jauh lebih rendah. Menurut analisis yang dilakukan oleh Bank Dunia, sekitar 55 persen penduduk Indonesia yang menyelesaikan pendidikan sekolah masih mengalami kesulitan membaca dan menulis secara fungsional, sementara hanya sekitar 14 persen di Vietnam dan 20 persen di negara-negara anggota OECD yang mengalami kondisi serupa (OECD, 2018).

Untuk meningkatkan kualitas serta kekuatan pendidikannya, Indonesia menggunakan banyak cara yang salah satunya adalah diplomasi. Dalam pengertiannya yang paling luas, diplomasi mengacu pada pelaksanaan urusan negara dengan cara damai menggunakan persuasi dan juga negosiasi (Berridge, 2005). Diplomasi juga digunakan sebagai sarana serta proses inti dari hubungan antar bangsa, sementara proses dari pembentukan hubungan antar negara dimulai secara efektif dengan terjalannya hubungan diplomasi antar negara. Menurut Adam Smith dalam studinya tentang *International Comparative Advantage*, negara-negara yang berbeda diberkahi dengan potensi yang berbeda dan potensi yang dianugerahkan ini hanya dapat diperoleh dan dimungkinkan melalui seni diplomasi (Bjola & Kornprobst, 2018). Secara sederhana, diplomasi dapat diartikan sebagai seni perwakilan negara dan proses negosiasi untuk mencapai kerja sama yang lebih baik dan menciptakan kehidupan yang damai di antara berbagai negara.

Seperti yang diketahui bahwa diplomasi ini utamanya dilakukan oleh negara, namun seiring dengan perkembangan zaman serta perubahan teknologi dan juga tantangan globalisasi, bahwa saat ini tanggung jawab negara tidak bisa hanya dilakukan oleh aktor sentral. Dengan adanya globalisasi saat ini, maka peran juga dapat diambil oleh aktor daerah atau dengan kata lain diplomasi daerah. Dengan adanya proses globalisasi yang semakin intensif sejak tahun 1990-an muncul segudang faktor yang menonjolkan serta memperumit interaksi antar aktor dalam sistem internasional (Aldecoa & Keating, 1999). Diplomasi daerah merupakan suatu aspek dan subjek yang masih tergolong baru dalam disiplin studi

hubungan internasional. Sebagian besar, sub-negara dan entitas otonom negara dapat memanfaatkan diplomasi daerah, yang merupakan kemampuan kebijakan dari entitas sub-negara (Setzer & Anderton, 2019).

Diplomasi daerah lahir untuk mengatasi tantangan lain yang tidak biasa terhadap kedaulatan negara seperti tuntutan untuk penentuan nasib sendiri oleh aktor subnasional yang biasanya mendefinisikan diri mereka sendiri sebagai identitas yang berbeda dari populasi negara bagian lainnya. Aktor subnasional dengan demikian memberi tantangan bagi kedaulatan negara di dua tingkatan, yaitu baik internal maupun eksternal dimana pada saat yang sama menawarkan mekanisme unik untuk mengubah tantangan tersebut menjadi peluang bagi manajemen konflik konstruktif (Baker & Eckerberg, 2008). Dalam beberapa isu-isu sulit, pemerintah pusat tidak selalu dapat berlaku segesit pemerintah kota dan negara bagian dalam menghadapi krisis. Isu-isu sulit tersebutlah yang menghadirkan peluang diplomasi daerah sebagai diplomasi yang dilakukan oleh pejabat di berbagai tingkat pemerintahan di bawah tingkat nasional untuk mengatasi hambatan yang membuat pemerintah nasional terjebak dalam kesulitan.

Upaya aktor subnasional untuk mengatasi perubahan ini merupakan gerakan besar yang dilakukan oleh para pemimpin daerah untuk menemukan kesamaan dengan mitra asing dalam memajukan tujuan bersama bahkan dalam menghadapi upaya yang terhenti di tingkat nasional. Dalam pengembangan pendidikan ini menunjukkan secara gamblang apa yang terjadi ketika pemerintah daerah tidak memiliki dukungan federal untuk mengatasi krisis. Hal tersebut juga menunjukkan kepada kita bahwa aktor subnasional dan pemerintah daerah sudah

berkoordinasi dengan mitra asing dan akan terus melakukannya. Sehingga dengan adanya diplomasi daerah ini, krisis serta isu yang ada pada aktor subnasional dapat mencapai solusi yang lebih cepat dan juga efisien karena pemerintah subnasional lebih dekat dengan masyarakat serta dapat menguji kebijakan eksperimental atau terobosan dengan risiko yang lebih kecil (Aldecoa & Keating, 2001).

Sama seperti manusia yang merupakan makhluk sosial, suatu negara pun tidak dapat melakukan pembangunannya sendiri. Hubungan yang saling bergantung antara negara dan kelompok-kelompok di dalamnya, termasuk pemerintah daerah, telah meningkat sebagai akibat dari kemajuan dalam teknologi komunikasi. Dengan fenomena ini, pemerintah daerah lebih suka bekerja sama dengan pemerintah lokal di negara lain untuk keuntungan bersama. Dengan adanya keterhubungan ini, kedua belah pihak dapat berpartisipasi dalam kegiatan yang bermanfaat bagi wilayah masing-masing. Selama hal tersebut sesuai dengan kebijakan luar negeri Indonesia, pemerintah memberikan kesempatan kepada pihak-pihak subnasional, seperti kota dan provinsi, untuk berpartisipasi dalam perjanjian dan kerja sama internasional. Diplomasi daerah adalah bentuk kerja sama antara pihak-pihak subnasional dari berbagai negara dalam berbagai bidang, termasuk pendidikan, budaya, teknologi, dan ekonomi. Dengan tetap mengikuti aturan pemerintah pusat dan tidak melanggarnya, peran pemerintah daerah sangat penting dalam diplomasi daerah (Rhamdani, 2015).

Di Indonesia sendiri, diplomasi daerah berkembang pada era setelah berakhirnya otoritarianisme dari Presiden Soeharto. Ada banyak peraturan yang

mengatur diplomasi daerah, mulai dari Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri hingga Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja sama Daerah Dengan Pemerintah Daerah Di Luar Negeri dan Kerja sama Daerah Dengan Lembaga Di Luar Negeri (Sekretaris Kabinet Republik Indonesia, 2023). Keluarnya Undang-Undang Pemerintahan Daerah Nomor 22 Tahun 1999 dan Nomor 32 Tahun 2004, yang memberikan otoritas kepada daerah untuk melakukan kerja sama internasional, mendorong peran Indonesia sebagai aktor subnasional dalam hubungan internasional (Sari, 2018).

Bandung adalah kota terbesar ketiga dan ibu kota Jawa Barat. Tujuan pemerintahan Kota Bandung adalah untuk menerapkan konsep *smart city* dalam pengelolaan pemerintahannya. Salah satu fokus utama pemerintahan Ridwan Kamil adalah pengembangan pendidikan pintar di bidang pendidikan. (Kamil, 2015). Pendidikan memiliki peranan yang sangat penting bagi Kota Bandung, sehingga implementasi diplomasi daerah menjadi hal menarik untuk dianalisis dalam rangka memajukan sektor pendidikan. Kota Bandung memiliki berbagai keunggulan yang memungkinkannya untuk bersaing dengan dunia global. Salah satu cara untuk meningkatkan potensi Kota Bandung adalah dengan membangun jaringan pemerintahan. Diplomasi daerah dilakukan tidak hanya dengan kota-kota otonom di Indonesia, tetapi juga dengan provinsi, kabupaten, dan kota di luar negeri. Dengan cara ini, Kota Bandung berharap dapat memanfaatkan kesempatan kerja sama dengan berbagai pihak untuk memperkuat sektor pendidikan dan mencapai tujuan *smart city* yang diinginkan.

Merujuk pada beberapa riset terdahulu mengenai peran pemerintah daerah di kancah internasional serta upayanya dalam diplomasi telah banyak diteliti. Pemerintah daerah pun dapat melakukan tugasnya lebih dekat dengan masyarakat dan dapat mengambil lebih banyak risiko untuk bereksperimen dengan langkah-langkah baru. Maka dari itu, pemerintah daerah seringkali membuat terobosan pada ide kebijakan baru sebelum diluncurkan atau diaplikasikan daerah lain. Kepemimpinan kebijakan semacam itu hanyalah salah satu bentuk dari keterlibatan pemerintah di arena diplomatik sehingga pemerintah daerah dapat bergerak melintasi pemerintah tingkat pusat, mematahkan skala tetap di mana pemerintah pusat biasanya beroperasi dan melaksanakan perannya. Beberapa riset ini yakni ditulis oleh Chen (2022), Cornago (2010), Joanita (2016), Pujayanti (2018), Putri (2014), dan Setzer & Anderton (2019).

Pendidikan di Indonesia dalam praktiknya masih belum menunjukkan proses yang ideal, banyak masalah yang masih bermunculan dari berbagai faktor. Perlu adanya upaya-upaya perencanaan strategis dan taktis dalam pengembangan pendidikan, antara lain seperti perumusan visi, misi, dan tujuan, perumusan sasaran, dan juga mengidentifikasi fungsi untuk mencapai sasaran. Pendidikan merupakan salah satu solusi untuk menghadapi tantangan sosial, ekonomi, dan budaya, sehingga memiliki peran sebagai agen perubahan yang melibatkan pemerintah, pendidik, dan masyarakat. Reformasi pendidikan harus berlangsung melalui dialog antara semua pihak yang terlibat, dengan tujuan membangun masyarakat yang mandiri dan memiliki pemahaman tentang demokrasi serta keadilan sosial. Beberapa riset yang membahas tujuan pendidikan nasional begitu

mulia tetapi dalam implementasinya masih belum sanggup untuk mewujudkannya dan akan sesuai apabila masalah dalam pendidikan dapat teratasi yaitu Chandra (2019), Mubin (2020), Muhaemin (2017), Sauri (2009), dan Suryana (2020).

Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pendidikan termasuk salah satu bidang pemerintahan yang harus dijalankan oleh Kabupaten/Kota (Gusman, 2020). Artinya, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk menyelenggarakan dan memajukan sektor pendidikan di wilayahnya. Hal ini menegaskan pentingnya peran pemerintah daerah dalam memastikan akses pendidikan yang baik dan merata bagi masyarakat di tingkat lokal, serta memperhatikan perkembangan dan kebutuhan pendidikan di wilayah Kabupaten/Kota tersebut. Menurut Dinas Pendidikan Kota Bandung, kondisi penyelenggaraan pendidikan di Kota Bandung menghadapi sejumlah masalah yang mempengaruhi berbagai aspek pendidikan, yaitu:

1. Masalah sarana dan prasarana

- Keterbatasan ruang kelas : Beberapa sekolah di Kota Bandung masih mengalami kekurangan ruang kelas yang memadai. Hal ini menyebabkan kepadatan siswa dalam satu kelas serta mengganggu proses pembelajaran yang efektif (Dinas Pendidikan Kota Bandung, Diakses pada 29 Mei 2023).
- Fasilitas pendukung pembelajaran : Beberapa sekolah juga menghadapi kekurangan fasilitas seperti laboratorium ilmiah, perpustakaan yang tidak lengkap, dan fasilitas olahraga yang tidak memadai. Hal tersebut dapat membatasi kemampuan siswa untuk melakukan eksperimen atau riset serta

mengakses sumber belajar yang memadai (Dinas Pendidikan Kota Bandung, Diakses pada 29 Mei 2023).

2. Masalah biaya pendidikan

- Biaya sekolah swasta : Sekolah swasta di Kota Bandung sering kali menetapkan biaya pendidikan yang tinggi. Hal ini cukup menyulitkan keluarga dengan keterbatasan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak-anak mereka. Sebagai akibatnya, beberapa anak mungkin tidak dapat mengakses pendidikan di sekolah-sekolah tersebut (Dinas Pendidikan Kota Bandung, Diakses pada 29 Mei 2023).
- Bantuan keuangan yang terbatas : Meskipun ada program bantuan seperti beasiswa, tetapi terkadang bantuan keuangan yang tersedia masih terbatas. Beberapa siswa yang berhak mendapatkan bantuan terkadang tidak dapat memperolehnya, sehingga menghambat akses mereka terhadap pendidikan yang layak (Dinas Pendidikan Kota Bandung, Diakses pada 29 Mei 2023).

3. Masalah tenaga pendidik dan kependidikan

- Jumlah tenaga pendidik yang tidak cukup : Kota Bandung menghadapi tantangan terkait jumlah tenaga pendidik yang kurang memadai untuk memenuhi kebutuhan pendidikan (Dinas Pendidikan Kota Bandung, Diakses pada 29 Mei 2023).
- Kualitas pendidikan guru : Diperlukan peningkatan dalam pendidikan formal bagi calon guru agar dapat memastikan bahwa para calon guru memiliki pengetahuan dan keterampilan yang cukup untuk mengajar

dengan efektif (Dinas Pendidikan Kota Bandung, Diakses pada 29 Mei 2023).

4. Masalah pengelolaan pendidikan

- Kurangnya koordinasi antar lembaga : Pengelolaan pendidikan yang efektif memerlukan koordinasi yang baik antara pemerintah kota, dinas pendidikan, sekolah, serta masyarakat. Terkadang, kurangnya koordinasi ini dapat menghambat pelaksanaan kebijakan dan juga program pendidikan (Dinas Pendidikan Kota Bandung, Diakses pada 29 Mei 2023).
- Akuntabilitas dan penggunaan anggaran : Pengelolaan pendidikan yang transparan dan akuntabel sangat penting. Kota Bandung perlu memperkuat mekanisme pengawasan dan juga evaluasi untuk memastikan anggaran pendidikan digunakan secara efisien dan sesuai dengan tujuan pendidikan yang diinginkan (Dinas Pendidikan Kota Bandung, Diakses pada 29 Mei 2023).

Untuk mengatasi masalah-masalah ini, pemerintah Kota Bandung dan juga berbagai pihak terkait sedang melakukan upaya perbaikan. Upaya perbaikan tersebut diwujudkan dalam bentuk kesepakatan diplomasi daerah Kota Bandung dan Fort Worth. Dengan merujuk kepada proses diplomasi daerah Kota Bandung dan Fort Worth, serta diplomasi daerah tersebut membangun pendidikan di Kota Bandung maka riset ini berjudul “Diplomasi Daerah Bandung Terhadap Fort Worth Dalam Pengembangan Pendidikan”.

1.2 Rumusan Masalah

Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya dalam latar belakang, muncul rumusan masalah yaitu, Bagaimana diplomasi daerah Kota Bandung terhadap Fort Worth dalam pengembangan pendidikan?

1.3 Tujuan dan Manfaat Riset

1.3.1 Tujuan Riset

Tujuan dalam riset ini adalah untuk menganalisis implementasi konsep diplomasi daerah oleh pemerintah Kota Bandung dengan Fort Worth dalam mengembangkan pendidikan formal di Kota Bandung.

1.3.2 Manfaat Riset

Riset ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis dan menjadi salah satu bahan referensi mengenai peran diplomasi daerah Kota Bandung untuk tujuan mengembangkan pendidikan.

Riset ini juga diharapkan dapat memberi manfaat praktis yang berupa pengetahuan mengenai proses pengembangan pendidikan Kota Bandung yang didalamnya terdapat proses diplomasi daerah.